



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I TAHUN 2024

Bagian Anggaran **005.05.403429**

**Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara**



Untuk priode yang berakhir tanggal 30 Juni 2024

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung

Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG 403429**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024
BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Pulau Bangka Komplek
Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513
PANGKALPINANG - Babel 403429
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 TAHUN 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 TAHUN 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TAHUN Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 TAHUN 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 30 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dara Nataha Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	07
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	08
A. Penjelasan Umum.....	08
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	08
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	09
A.3. Basis Akuntansi.....	09
A.4. Dasar Pengukuran.....	09
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	18
B.1. Pendapatan.....	18
B.2. Belanja.....	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	20
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	20
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas.....	21
C.3. Persediaan.....	21
C.4. Utang Kepada Pihak Ketiga.....	22
C.5. Uang Muka dari KPPN.....	22
C.6. Ekuitas.....	22

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	23
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	23
D.2.	Beban Pegawai.....	24
D.3.	Beban Persediaan.....	24
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	25
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	26
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	26
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	27
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	27
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	28
E.1.	Ekuitas Awal.....	28
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	28
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	28
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	28
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	29
E.5.	Ekuitas Akhir.....	29
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	30
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	30
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	30
Lampiran-lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

JL.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Prov. BABEL.Pangkalpinang - BABEL Telp.0717-911151

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2024

Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris,

Dora Natalia Singarimbun, S.E.,M.M.
NIP. 198112292006042015

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 TAHUN 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 TAHUN 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2024 s.d. 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai semester I TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2.613.500,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 6.972.000,-

Realisasi Belanja Negara sampai semester I TA 2024 adalah sebesar Rp 15.000.000,- atau mencapai 19% dari alokasi anggaran sebesar Rp 77.250.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2024 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023, Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.103.920,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 1.448.500,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 3.809.420,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 3.809.420,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0,-.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 1.294.500,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 1.294.500,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan -LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan -LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 2.613.500,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 15.154.000,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 12.540.500,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(Defisit) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 12.540.500,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 1.448.500,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 12.540.500,-), kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 12.386.500,-. Kenaikan/Penurunan ekuitas senilai (Rp. 154.000) sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. 1.294.500,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Catatan	TA 2024		
		Anggaran	Realisasi	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	6.972.000	2.613.500	37
Hibah		0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		6.972.000	2.613.500	37
B. Belanja Negara	B.2			
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	00
2. Belanja Barang	B.2.2.	77.250.000	15.000.000	19
3. Belanja Modal	B.2.3.	0	0	00
Jumlah Belanja Negara		77.250.000	15.000.000	19

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	600.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	3.055.420	0
Persediaan	C.1. 3.	5.103.920	1.448.500
Jumlah Aset Lancar		5.103.920	1.448.500
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	0	(0)
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya			
C.4			
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset	C.4. 3.	(0)	(0)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		5.103.920	1.448.500
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	3.055.420	
Utang yang belum ditagihkan	C.5. 2.	154.000	
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	600.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.809.420	0
Jumlah Kewajiban		3.809.420	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	1.294.500	1.448.500
Jumlah Ekuitas		1.294.500	1.448.500
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		5.103.920	1.448.500

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2.613.500	6.972.000
Jumlah Pendapatan		2.613.500	6.972.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	0	1.640.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	15.154.000	13.260.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	567.600
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Jumlah Beban		15.154.000	15.467.600
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(12.540.500)	(13.085.100)
Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 11	0	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(12.540.500)	(13.085.100)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2024 DAN 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Ekuitas Awal	E. 1	1.448.500	4.039.715
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(12.540.500)	(13.085.100)
Ekuitas	E. 3		
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.4	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	12.386.500	12.517.500
Kenaikan/penurunan ekuitas		(154.000)	(567.600)
Ekuitas Akhir		1.294.500	3.472.115

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I TAHUN 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) Aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 TAHUN 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TAHUN 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TAHUN anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TAHUN anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urus Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 TAHUN.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 TAHUN 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap asset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah asset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada TAHUN 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saatada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 TAHUN
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 TAHUN
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 TAHUN
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 TAHUN

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (TAHUN)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman TAHUNan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengadakan 2X revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Revisi I tanggal 16 Februari 2024 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan I (Januari-Maret).
2. Revisi II tanggal 17 April 2024 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni).

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.972.000	6.972.000
Jumlah Pendapatan	6.972.000	6.972.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	77.250.000	77.250.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	77.250.000	77.250.000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp.2.613.500

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 2.613.500,-. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB

No.	Uraian	2024		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	620.000	270.000	43,55
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.420.000	520.000	36,62
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	4.932.000	1.823.500	36,97
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		6.972.000	2.613.500	37,49

B.2. Belanja.....

Realisasi Belanja
Negara :
Rp. 15.000.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 15.000.000 atau sebesar 19% dari anggaran senilai Rp. 77.250.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2024 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024

Uraian	2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	77.250.000	15.000.000	19
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	77.250.000	15.000.000	19
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	77.250.000	15.000.000	19

Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 senilai Rp 14.900.000,- dari total PAGU Rp.36.175.000,- atau senilai 41%, Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 mengalami penurunan penyerapan anggaran belanja barang yaitu sebesar 22%. Hal ini menandakan adanya belanja sidang keliling yang sampai dengan pembuatan laporan keuangan belum terealisasi dikarenakan tidak ada perkara yang memenuhi kriteria untuk diadakan sidang keliling.

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp. 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp.15.000.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 dan Rp. 14.900.000.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.600.000,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp. 0, kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2024

Uraian	TA 2024
Uang Tunai di Brankas	446.000
Uang di Bank	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	154.000
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	600.000

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni TA 2024

Uraian	TA 2023
Uang Tunai di Brankas	0
Kuitansi yang belum di SPM Gukan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 sebesar Rp 3.055.420,-

C.4. Persediaan

Persediaan per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp. 1.448.500,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Sesuai dengan berita acara stock opname fisik.

C.5. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Uang Muka
dari KPPN:
Rp.0

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp. 1.294.500

Ekuitas per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 1.294.500,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan
PNBP:
Rp.2.613.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 Rp. 2.613.500
Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024

No.	Uraian	2024		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	620.000	270.000	43.55
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1.420.000	520.000	36.62
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	4.932.000	1.823.500	36.97
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		6.972.000	2.613.500	37.49

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp.0
Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2024

Uraian	TA 2024
Beban Gaji Pokok PNS	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0
Beban Tunj. Anak PNS	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0
Beban Tunj. PPh PNS	0
Beban Tunj. Beras PNS	0
Beban Uang Makan PNS	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0
Total Beban Pegawai	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp. 0

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0,-
Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2024

Uraian	TA 2024
Beban Persediaan Konsumsi	0
Total Beban Persediaan	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp.
15.000.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2024 sebesar Rp. 15.000.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa Beban Barang Non Operasional lainnya dan Beban Jasa Profesi

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2024

Uraian	TA 2024
Beban Bahan	13.330.000
Beban Jasa Konsultan	12.000.000
Total Beban Barang dan Jasa	15.000.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan:
Rp. 0,-

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0,-

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2024

Uraian	TA 2024
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0
Total Beban Pemeliharaan	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas : Rp. 0

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2024 sebesar Rp. 0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024

Uraian	TA 2024
Beban Perjalanan Biasa	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni TA 2024 sebesar Rp 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2024

Uraian	TA 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Beban Amortisasi Software	0
Beban Penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional : Rp. 0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk TAHUN 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024

Uraian	TA 2024
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp 1.448.500,-
Rp. 1.448.500

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp.12.540.500). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
(Rp 12.540.500)

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp0 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar Entitas : Rp 12.386.500,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.12.386.500,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.000.000
Diterima Dari Entitas Lain	(2.613.500)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	12.386.500

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp. (2.613.500) sedangkan DKEL sebesar Rp 15.000.000,-

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 1.294.500,-
Rp. 1.294.500,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di TAHUN Anggaran 2024 maupun TAHUN Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan TAHUNan TAHUN 2024.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

2. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.0.
4. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp 3.055.420

F.2.4. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan semester I 2024 terdapat 2 (Dua) kali Revisi DIPA yaitu :

1. Revisi I tanggal 14 April 2024 Revisi Hal. III DIPA Tentang Rencana Penarikan Dana Triwulan II (April-Juni)
2. Revisi II tanggal 12 Juni 2024 Revisi Hal III DIPA tentang Rencana Penarikan Dana Triwulan III (Juni-September)

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan semester I 2024 tidak terdapat ralat SPM, SSBP, maupun SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan Semester I TAHUN 2024 ini

LAMPIRAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 26/07/24 10:57 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	600,000	0	600,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,055,420	0	3,055,420	0.00
Persediaan	1,448,500	1,448,500	0	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	5,103,920	1,448,500	3,655,420	252.36
JUMLAH ASET	5,103,920	1,448,500	3,655,420	252.36
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,055,420	0	3,055,420	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	154,000	0	154,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	600,000	0	600,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,809,420	0	3,809,420	
JUMLAH KEWAJIBAN	3,809,420	0	3,809,420	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,294,500	1,448,500	(154,000)	(10.63)
JUMLAH EKUITAS	1,294,500	1,448,500	(154,000)	(10.63)
JUMLAH EKUITAS	1,294,500	1,448,500	(154,000)	(10.63)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,103,920	1,448,500	3,655,420	252.36

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 26 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DORA NATALIA SINGARIMBUN, SE

198112292006042015

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 26/07/24 10:58 AM

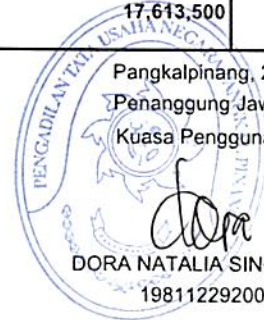
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	15,000,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,613,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	0	270,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	520,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,823,500
3.0	521211	Belanja Bahan	3,000,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	12,000,000	0
JUMLAH			17,613,500	17,613,500

Keterangan :

FINAL



Pangkalpinang, 26 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN, SE

198112292006042015

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 26/07/24 10:58 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	15,000,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,613,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	270,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	520,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	1,823,500
3.0	521211	Belanja Bahan	3,000,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	12,000,000	0
JUMLAH			17,613,500	17,613,500

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 26 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DORA NATALIA SINGARIMBUN, SE
198112292006042015

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 05
SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 403429

Tgl Data : 26/07/24 6:24 AM
 Tgl Cetak : 26/07/24 10:57 AM
 Halaman : 2
 lap_ira_face_saiker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	77,250,000	15,000,000	(62,250,000)	19	36,175,000	14,900,000	21,275,000	41
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 26/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 26/07/24 10:56 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,448,500	4,039,715	(2,591,215)	(64.14)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,540,500)	(13,085,100)	544,600	(4.16)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,386,500	12,517,500	(131,000)	(1.05)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(154,000)	(567,600)	413,600	(72.87)
EKUITAS AKHIR	1,294,500	3,472,115	(2,177,615)	(62.72)

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 26 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



DORA NATALIA SINGARIMBUN, SE
198112292006042015

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 26/07/24 10:56 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,613,500	2,382,500	231,000	9.696
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,613,500	2,382,500	231,000	9.696
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,613,500	2,382,500	231,000	9.696
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	1,640,000	(1,640,000)	(100)
Beban Barang dan Jasa	15,154,000	13,260,000	1,894,000	14.284
Beban Pemeliharaan	0	567,600	(567,600)	(100)
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 26/07/24 10:56 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,154,000	15,467,600	(313,600)	(2.027)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12,540,500)	(13,085,100)	544,600	(4.162)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12,540,500)	(13,085,100)	544,600	(4.162)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12,540,500)	(13,085,100)	544,600	(4.162)

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 26 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



[Handwritten Signature]
DORA NATALIA SINGARIMBUN, SE
198112292006042015

FORMULIR JURNAL BALIK

Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 05 DIRJEN BADILMILTUN MA RI
 Wilayah : 3000 BANGKA BELITUNG
 Satuan Kerja : 40349 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
 No. Dokumen : Jurnal Balik Atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
 Tanggal : 30 Juni 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik Atas Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kategori Jurnal Balik

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2.773.420	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		2.773.420
Total				2.347.420	2.347.420

Dibuat oleh : Kasubbag Umum dan Keuangan
 Tanggal : 30 Juni 2024



MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.
 NIP.198502072006041001

Disetujui oleh : KPA
 Tanggal : 30 Juni 2024



DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M.
 NIP : 198112292006042015

Direkam oleh : Operator GLP
 Tanggal : 30 Juni 2024



FANNY RUSPANJI, S.E.I.
 NIP.199004122020121009

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Jurnal Penyesuaian Manual.

**RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 JUNI 2024**

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : DIRJEN BADILMILTUN MA RI
 WILAYAH : BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	TUNAI	SALDO PER 30 JUNI 2024		Keterangan
						Saldo	Bank dan No Rek	
1	3000	Bangka Belitung	403429	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	Rp -	Rp 3.055.420,00	0063-01-002185-30-7 (RPL 015 PDT PTUN PKP) BRI	Rp 3.055.420,00
JUMLAH					Rp -	Rp 3.055.420,00		Rp 3.055.420,00

Pangkalpinang, 30 JUNI 2024
 Sekretaris

 DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M
 NIP. 198112292006042015

RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 JUNI 2024

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : DIRJEN BADILMILTUN MA RI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2024			Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		
						Saldo	Bank dan No Rek	
1	3000	Bangka Belitung	403429	PTUN Pangkalpinang	Rp 446.000	Rp -	BRI Cab Pangkalpinang 651554034291000 (BPG 015 PTUN PKP 403429)	Rp 446.000 Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp 446.000,-
					Rp 154.000	Rp -		Rp 154.000 Kuitansi UP Selisih karena Kesulitan Mencari pecahan
					Rp 600.000	Rp -		Rp 600.000 Jumlah UP
				JUMLAH	Rp 600.000	Rp -		Rp 600.000 Jumlah UP



**DAFTAR MONITORING PENUTUPAN REKENING
PERIODE 30 JUNI 2024
KHUSUS PENUTUPAN DI TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ESI	JEMIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	TANGGAL PENUTUPAN	ALASAN PENUTUPAN
NIHIL									



 Pangkalpinang, 30 Juni 2024
 Sekretaris
 Dora Natalia Singarimbun, S.E.,M.M.
 NIP. 198112292006042015

**REKAPITULASI DAFTAR REKENING BANK
PER 30 JUNI 2024**

URAIAN	NOMOR REKENING	NAMA BANK
BENDAHARA PENGELUARAN	651554034291000 (BPG 015 PTUN PKP 403429)	BRI
BENDAHARA PENERIMAAN	-	-
REKENING LAINNYA	0063-01-002185-30-7 (RPL 015 PDT PTUN PKP)	BRI

Pangkalpinang, 30 Juni 2024
Sekretaris



Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

RINCIAN NILAI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
PER 30 JUNI 2024

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 ESELON I : DIRJEN BADILMILTUN MA RI
 WILAYAH : BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO PER 30 JUNI 2024			Keterangan
					TUNAI	Saldo Bank		
						Saldo	Bank dan No Rek	
1	3000	Bangka Belitung	403429	PTUN Pangkalpinang	Rp 446.000	Rp -	BRI Cab Pangkalpinang 651554034291000 (BPG 015 PTUN PKP 403429)	446.000 Rp Uang Tunai di Brankas Bendahara Rp 446.000,-
					Rp 154.000	Rp -		154.000 Rp Kuitansi UP
					Rp -	Rp -		- Rp Selsih karena Kesulitan Mencari pecahan
				JUMLAH	Rp 600.000	Rp -		600.000 Rp Jumlah UP



**RINCIAN SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
PER 30 JUNI 2024**

**BA : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
ESELON I : DIRJEN BADILMILITUN MA RI
WILAYAH : BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	NAMA SATKER	TUNAI	SALDO PER 30 JUNI 2024		Keterangan
						Saldo	Bank dan No Rek	
1	3000	Bangka Belitung	403429	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	Rp -	Rp 3.055.420,00	0063-01-002185-30-7 (RPL 015 PDT PTUN PKP)	Rp 3.055.420,00
							BRI	
JUMLAH					Rp -	Rp 3.055.420,00		Rp 3.055.420,00


Pangkalpinang, 30 JUNI 2024
Sekretaris
DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M
NIP. 198112292006042015



**BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIREKTORAT BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER I TAHUN 2024**

BAGIAN ANGGARAN 005.05



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

DIREKTORAT BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER I

TAHUN ANGGARAN 2024

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprop
Telp. 07179111513
Pangkalpinang - Bangka Belitung 33148
e-mail : pangkalpinang@ptun.org

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di

dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester I tahun 2024 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Pangkalpinang, 30 Juni 2024

Kuasa Pengguna Barang



Dora Natalia Singarimbun, SE., M.M.
NIP. 19811229 200604 2 015

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Barang Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	16
V. Kendala dan Saran	18
5.1. Kendala	18

5.2. Saran	18
VI. Penutup	19

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara
- B. Laporan Barang Intrakomptabel
- C. Laporan Barang Ekstrakomptabel
- D. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- E. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan
- F. Laporan Aset Tak Berwujud
- G. Laporan Barang Bersejarah
- H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan
- I. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik
- J. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca
- K. Laporan Hibah
- L. Laporan Penyusutan BMN
- M. RTH DAN SURAT KETERANGAN BMN

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkian pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI ASET TETAP tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Sakti Modul Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data pendukung SAKTI ASET TETAP dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SAKTI ASET TETAP tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SAKTI ASET

TETAP , sehingga proses penyamaan data dilakukan secara otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ke tingkat Pengguna Barang, yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I tahun_2024 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Neraca Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp.1.448.500,00 (*Satu Juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	1.448.500
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Aset tak Berwujud	0
Akumulasi Penyusutan Software	0
Aset Lainnya	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0
Total	1.448.500

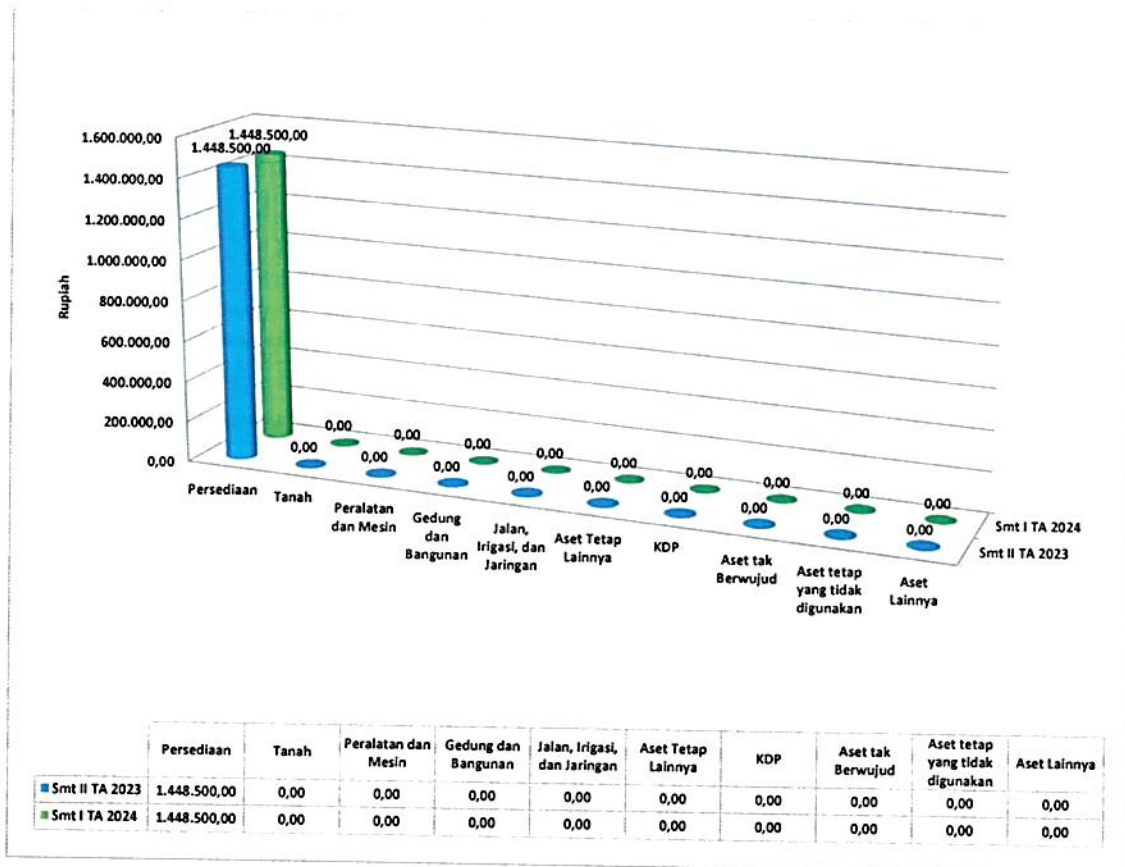
Berikut tabel dan grafik kenaikan/penurunan nilai BMN Semester II 2023 dengan Semester I 2024.

*TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024
(NILAI INTRAKOMPTABEL)*

<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER II TA 2023</i>	<i>SEMESTER I TA 2024</i>
Persediaan	1.448.500	1.448.500
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0

Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	1.448.500	1.448.500

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024
(NILAI INTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2024 tidak mengalami perubahan;
- Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2024 tidak mengalami perubahan.

- c. Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2024 tidak mengalami perubahan.
- d. Asset tetap lainnya berupa monografi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
- e. Aset tetap yang tidak digunakan oleh operasi pemerintahan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak bertambah dari sebelumnya.

4.2.2. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai sebesar Rp 1.448.500,- yang berasal dari saldo persediaan barang TKTM yang belum digunakan.

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024*

PERSEDIAAN	SEMESTER II TA 2023	SEMESTER I TA 2024
Barang Konsumsi	1.448.500	1.448.500

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2024 tidak ada pengerjaan konstruksi sehingga nilai dari konstruksi dalam pengerjaan Rp. 0

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Pada Neraca UAKPB Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2024, tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2024.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG*

SEMESTER I TAHUN 2024

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	1.448.500	1.448.500
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0

Akumulasi Penyusutan Software	0	0
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	1.448.500	1.448.500

4.4 LAIN-LAIN

Pada Semester I TA 2024, tidak terdapat pembelian aset ekstrakomptabel

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

Tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2024

5.2. SARAN

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester I Tahun 2024 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempertahankan predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan reformasi birokrasi sepenuhnya di bidang anggaran, manajemen aset (BMN) dan pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan pengadilan di bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

MAHKAMAH AGUNG
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 null

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tanggal : 26/07/2024 14.13.03
 Halaman : 1 dari 1
 Kode Lap : lap_crbtnm_saiker_po

NAMA UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

KODE	JENIS TRANSAKSI	SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	URAIAN 2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL							

LAMPIRAN II
LAPORAN BMN
INTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN III
LAPORAN BMN
EKSTRAKOMPTABEL

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 005
UAKPB : 403429

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 26/07/24 10:43 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_skel_salker_poc

KODE	AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024		
			Kuantitas	Nilai	BERTAMBAH		BERKURANG		Kuantitas	Nilai	
					Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai			
1	URAIAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAMPIRAN IV
LAPORAN BMN
GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN VI
LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD

LAMPIRAN V

*LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan*

LAMPIRAN VII

*LAPORAN BARANG
BERSEJARAH*

LAMPIRAN VIII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprop Telp / Fax. (0717) 9111513
Pangkalpinang - Bangka 33148
Email : info@ptun-pangkalpinang.go.id Website : www.ptun-pangkalpinang.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
SATUAN KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG (403429)
SEMESTER I TAHUN 2024
NOMOR : 128d/SEK.PTUN.W5.TUN5/PL.1.2.5/VI/2024**

Pada hari ini Minggu Tanggal tiga puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-06-2024), bertempat di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Muhammad Agus, S.E., M.Si.**
NIP : **19850207 200604 1 001**
Jabatan : Petugas UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : **Fanny Ruspanji, S.E.I.**
NIP : **19900412 202012 1 009**
Jabatan : Petugas UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran)
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 30 Juni Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2023		
		Saldo Awal per 31 Desember 2023	Mutasi	Saldo Akhir per 30 Juni 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR	1.448.500	0	1.448.500
1	Persediaan	1.448.500	0	1.448.500
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	1.448.500	0	1.448.500
E	EKSTRAKOMPABEL	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	1.448.500	0	1.448.500

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKK/L disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 30 Juni Tahun Anggaran 2024, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Asset

Muhammad Agus, S.E., M.Si
NIP. 198502072006041001


Operator GLP

Fanny Ruspanji, S.E.I.
NIP. 199004122020121009

Mengetahui
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Dora Natalia Singarimbun, SE., M.M
NIP. 19811229 200604 2 015

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	barang

II. PERIODE			
0	6	/	2 4

UNIT ORGANISASI

1. Kode - - - - -

2. Nama

III. SALDO AKHIR PERIODE YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	GLP	ASET TETAP	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	1.448.500	1.448.500	1.448.500
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
2	Persediaan	1.448.500	1.448.500	1.448.500
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset tetap lainnya	0	0	0
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	1.448.500	1.448.500	1.448.500
E	EKSTRAKOMPABEL	0	0	0
F	TOTAL (D + E)	1.448.500	1.448.500	1.448.500

IV. DATA KOREKSI AUDIT SALDO NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	1.448.500	0	0	1.448.500
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
2	Persediaan	1.448.500	0	0	1.448.500
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Aset tetap lainnya	190.000	0	0	190.000
5	Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0	0
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
8	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
9	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	1.448.500	0	0	1.448.500
E	EKSTRAKOMPABEL	0	0	0	0
F	TOTAL (D + E)	1.448.500	0	0	1.448.500

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN
keuangan barang

II. PERIODE
0 6 / 2 4

UNIT ORGANISASI

1. Kode 0 0 5 - 0 1 - 3 0 0 4 0 3 4 2 9 - 0 0 0 - K D

2. Nama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung,

V. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL			TOTAL
			Belanja Barang	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	ASET LANCAR	0	0	0	0	0
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0	0
2	Persediaan	0	0	0	0	0
B.	ASET TETAP	0	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
5	Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	0	0	0	0	0
6	Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	0	0	0	0	0
7	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
8	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0	0
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
2	Aset Lain-lain	0	0	0	0	0
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0	0	0	0	0
E	EKSTRAKOMPABEL	0	0	0	0	0
F	TOTAL (D+E)	0	0	0	0	0

VI. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Bulan Juni Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.0,-

VII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada Pengungkapan lain-lain yang perlu dijelaskan dalam Rekonsiliasi Data BMN ini.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
barang	keuangan

II. PERIODE			
0	6	2	4

UNIT ORGANISASI																				
1. Kode	0	0	5	0	1	3	0	0	0	4	0	3	4	2	9	0	0	0	K	D
2. Nama	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang																			
	Jl. Pulau Bangka, Komplek Pemprov Bangka Belitung.																			

VIII. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
27							

IX. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Tot. Rupiah SPPA	Selisih
							0
NIHIL							

X. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM MEMBENTUK BMN

No.	No. SP2D	Tgl. SP2D	Jns. Belanja	Uraian Jns. Belanja	Rupiah SPM	Keterangan
NIHIL						

LAMPIRAN IX

*Laporan Persediaan dan
BA Opname Fisik*



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33684

Telepon : 0717 – 9111513, Email: pangkalpinang@ptun.org

Website: ptun-pangkalpinang.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)

Nomor : 128b/SEK.PTUN.W5.TUN5/PL.1.2.5/VI/2024

Nama Satker : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
Kode Satker : 403429
UAPPB-W : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG.
UAPPB-EI : DIREKTORAT BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh empat bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim opname fisik :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
NIP : 198502072006041001
Jabatan : Ketua.
2. Nama : Rosalina, S.E. (Staf Umum dan Keuangan)
NIP : 199208082019032017
Jabatan : Sekretaris.
3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I. (Staf Pengelola Persediaan).
NIP : 199004122020121009
Jabatan : Anggota.

Menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan (Opname Fisik) Semester I Tahun 2024 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Persediaan (Stock Opname) ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

JALAN PULAU BANGKA, KOMPLEK PERKANTORAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 33684

Telepon : 0717 – 9111513, Email: pangkalpinang@ptun.org

Website: ptun-pangkalpinang.go.id

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Nama : Muhammad Agus, S.E.,M.Si.
2. Nama : Rosalina,S.E.
3. Nama : Fanny Ruspanji, S.E.I.



.....

.....

.....

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang




Dora Natalia Singarimbun, SE.,M.M
NIP. 19811229 200604 2 015

REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)

UNTUK PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2024

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429.000.KD

Tanggal : 26-07-2024

UAKB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Halaman : 1 dari 7

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301001	000001	Spidol Snowman	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301001	000002	Pensil	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301001	000003	Pena	Kotak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301001	000004	Spidol Biasa	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301001	000005	stabilo	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301001	000006	pena g2-07	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301001	000007	pena baliner	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301001	000008	pena	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301001	000009	Spidol WB	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301002	000001	Tinta Suntik	Kotak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301003	000001	Klip Kecil	Kotak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301003	000002	Binder Klip	Kotak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301003	000003	Binder Clip	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301003	000004	Binder Clip 280	Kotak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301004	000001	Penghapus Pinsil	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301004	000002	tipe x	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301004	000003	Tipe X kertas	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000001	Buku Folio	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000002	Buku Agenda Sidang Hakim PTUN	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000003	Buku Agenda Sidang Panitera	Buku	2024-06	0

REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)

UNTUK PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2024

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429.000.KD

Tanggal : 26-07-2024

UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Halaman : 2 dari 7

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000004	Buku Himpunan Perundang-Undangan	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000005	Buku Profil PTUN	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000006	Buku Himpunan Ringkasan Disertasi Karya Ilmiah	-	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000007	Buku Register Induk Perkara PTUN	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000008	Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Insidentil	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000009	Buku Register Bantu Posbakum PTUN	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000010	Buku Register Perkara Permohonan	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000011	Buku Bantu Keuangan Perkara (K1-T1)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000012	Buku Jurnal Keuangan Perkara TK 1 (K1 -T2)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000013	Buku Induk Keuangan Perkara (K1 - T3)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000014	Buku Bantu Hak-Hak Kepaniteraan Tingkat Pertama (K1 - T4)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000015	Buku Hak-Hak Kepaniteraan Permohonan Banding (K1 - T5)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000016	Buku Hak-Hak Kepaniteraan Permohonan Kasasi (K1 - T6)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000017	Buku Hak-Hak Kepaniteraan Permohonan PK (K1 - T7)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000018	Buku Keuangan ATK Perkara (K1 - T8)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000019	Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding PTUN (K1 - T3)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000020	Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi PTUN (K1 - T4)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000021	Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali (PK) PTUN (K1 - T5)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000022	Buku Jurnal Keuangan Pengawasan Eksekusi PTUN (K1 - T6)	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000023	buku agenda	pcs	2024-06	0

REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)

UNTUK PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2024

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429.000.KD

Tanggal : 26-07-2024

UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Halaman : 3 dari 7

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000024	Buku folio sedang	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000025	Glosarium	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000026	Jenis Layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000027	Proses Pendaftaran Perkara di Pengadilan Manual	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000028	Proses Berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000029	Kalender	Buku	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000030	Buku Himpunan Rumusan Kegiatan Kelompok Kerja dan Bimtek di Lingkungan PTUN & Hasil	Buah	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000031	Buku Tulis	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301005	000032	Buku Quarto	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301006	000001	Map	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301006	000002	Box Files	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301006	000003	Map Bindek	Kotak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301006	000004	odner	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301006	000005	map batik	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301006	000006	Map Snell	dus	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301006	000007	Map	Pak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301006	000008	Map Snel	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301007	000001	Penggaris	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301008	000001	Cutter	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301010	000001	Lem O'glue	Pcs	2024-06	0

REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)

UNTUK PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2024

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429.000.KD

Tanggal : 26-07-2024

UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Halaman : 4 dari 7

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301010	000002	Double Tip	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301010	000003	lakban hitam	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301010	000004	Lakban Bening	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301010	000005	Lakban Hitam Kecil	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301010	000006	Lem Stick	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301012	000001	staples	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301012	000002	staples	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301013	000001	Isi Staples No. 10	Kotak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301013	000002	Isi Staples Sedang	Kotak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301999	000001	Gunting	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301999	000002	Pembolong Kertas	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301999	000003	Pembatas Kertas	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010301999	000004	Peruncing	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302001	000001	Kertas HVS F4	RIM	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302001	000002	Kertas HVS A4	RIM	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302001	000003	Kertas HVS F4 Warna	Rim	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302001	000004	KERTAS A3	RIM	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302001	000005	Tissu	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302002	000001	Kertas Karton Hitam	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302002	000002	Kertas Kambing	rim	2024-06	0

REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)

UNTUK PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2024

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429.000.KD

Tanggal : 26-07-2024

UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Halaman : 5 dari 7

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302002	000003	Kertas Pembungkus	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302002	000004	KERTAS COKLAT	PCS	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302002	000005	KERTAS GLOSSY F4	PAK	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302002	000006	Post It	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302002	000007	Milka Bening	Pak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302002	000008	Tisu	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302004	000001	Amplop Putih Kecil	Kotak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302004	000002	Amplop Coklat	lembar	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302999	000001	Kertas sertifikat	lembar	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010302999	000002	Kertas Sertifikat	Pak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010303999	000001	Cartridge Hitam	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010303999	000002	Cartridge Warna 811	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010304006	000001	flash disk	unit	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010305008	000001	Pembersih Kaca	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010305008	000002	Pembersih lantai	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010305012	000001	pengharum ruangan gantung	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010305012	000002	pengharum	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010305999	000001	Kalung Jabatan	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010305999	000002	Tanda lambang jabatan hakim dan panitera	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010305999	000003	Bendera Merah Putih	Buah	2024-06	0

REGISTER TRANSAKSI HARIAN BARANG PERSEDIAAN (OPNAME FISIK)

UNTUK PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2024

KODE UAKPB : 005.05.3000.403429.000.KD

Tanggal : 26-07-2024

UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Halaman : 6 dari 7

No. Dok	Tgl. Buku	Kd Sub-sub Kelompok	Kd Barang	Nama Barang	Satuan	Periode	Jumlah
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010305999	000004	Bendera Pengadilan	Buah	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010305999	000005	Kain Laken	Roll	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010306010	000001	Baterai AAA	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010306010	000002	Baterai AA	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010307001	000001	Jas Panitera	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010307001	000002	Toga Hakim	Pcs	2024-06	1
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010307006	000001	Tanda Lambang Hakim dan Panitera	Pcs	2024-06	2
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010309999	000001	kotak alat tulis	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010309999	000002	Alat Pengharum Ruangan	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010309999	000003	Catridge Tinta	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010310999	000001	tempat tisu	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010310999	000002	Tempat Pena	Buah	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010399999	000001	Lakban Bening	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010399999	000002	plastik sampah	Pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010399999	000003	Tissue	Pak	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010399999	000004	Materal 10000	Lembar	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010399999	000005	Gula	bungkus	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010399999	000006	Kantong plastik	pcs	2024-06	0
005053000403429000KD202400001P	30-06-2024	1010501001	000001	Materal 10000	Lembar	2024-06	0

LAMPIRAN X

*LAPORAN POSISI BMN
DAN KEUANGAN PADA
NERACA*

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl.Data : 26/07/24 6:21 AM
Tgl.Cetak : 26/07/24 10:45 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,448,500
J U M L A H		1,448,500

LAMPIRAN XII

*LAPORAN PENYUSUTAN
BMN*

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 26/07/24 10:44 AM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT		SALDO 30 JUNI 2024				NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG

UAKPB : 403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 26/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 26/07/24 10:44 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_skel_satker_poc

AKUN NERACASUB KELOMPOK BARANG		SAT		SALDO 30 JUNI 2024				NILAI BUKU
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8	

LAMPIRAN XI

Laporan Hibah

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

NAMA UAKPB : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
KODE UAKPB : 403429

TANGGAL : 26-07-2024
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

LAMPIRAN XIII
RTH DAN SURAT
KETERANGAN BMN

LAMPIRAN XII
LAPORAN PENYUSUTAN
BMN

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tangan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa asset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester 1 Tahun Anggaran 2024.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Semester 1 Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang .

Nilai BMN (intrakomptabel) yang disajikan pada Semester 2 Tahun 2023 ini adalah sebesar Rp. Rp.1.448.500,00 (Satu Juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp.1.448.500,00 (Satu Juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) tidak ada perubahan yang terjadi selama Semester 1 Tahun Anggaran 2024.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal GLP – Aset Tetap pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 30 Juni 2023

a. Saldo Awal Semester 2 TA 2023

Nilai BMN per 1 Januari 2024 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebesar Rp.1.448.500,00 (Satu Juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari nilai persediaan sebesar Rp. Rp.1.448.500,00 (Satu Juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah).

b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Tidak terdapat Mutasi BMN per Semester 1 Tahun 2024.

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024 sebesar Rp.1.448.500,00 (Satu Juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), tidak terdapat perubahan nilai persediaan dikarenakan pembelian persediaan langsung ditransfer ke Posbankum PTUN Pangkalpinang dan saldo persediaan berasal dari barang persediaan TKTM yang belum disalurkan dikarenakan kebutuhan akan alat kelengkapan persidangan sudah terpenuhi

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	1.448.500	0	1.448.500
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	00	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku		0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	1.448.500	0	1.448.500

b. Tanah

Tidak terdapat nilai pada Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024

c. Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat nilai pada Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024

d. Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat nilai pada Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024

f. Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat nilai pada Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak terdapat nilai pada Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024

h. Aset Lainnya

Tidak terdapat nilai pada aset lainnya dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024

1. Barang Milik Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.448.500,00 (Satu Juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, dan Akumulasi Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
117111	Persediaan	1.448.500
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	0
133111	Gedung dan Bangunan	0

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA**SEMESTER 1 TAHUN 2024**

135121	Aset Tetap Lainnya	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0
169122	Akumulasi Penyusutan Asset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	0
JUMLAH		1.448.500,00

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per Semester 1 Tahun 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut :

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	1.448.500	1.448.500
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset tak Berwujud	0	0
Akumulasi Penyusutan Software	0	0

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA**SEMESTER 1 TAHUN 2024**

Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	0
Total	1.448.500	1.448.500

2. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN, langkah-langkahstrategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai permasalahan laporan keuangan.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Semester 1 Tahun 2024
Kuasa Pengguna Barang



Romatua Lasma Sembiring, S.H.
NIP. 19711012.199203 2 001